KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MEMBANGUN BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN MELALUI MANAJEMEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI BIDAN REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025

- Efektif, efisien dan ekonomis
- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi
- Terbangunnya budaya kinerja organisasi dan individu

Visi

Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia

DYNAMIC GOVERNANCE

2024

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

2019

Roadmap 2020-2025
Periode III

Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik; e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f. komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

Periode II
Roadmap 2015-2019

2014

RULE BASED BUREAUCRACY

Perpres No. 81 Th. 2010

2010

Roadmap 2010-2014
Periode I

Terbangunnya regulasi-regulai yang menjadi landasan yang kuat untuk menjamin implementasi RB yang konsisten dan berkesinambungan

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025

Kerangka pelaksanaan Reformasi birokrasi

Prinsip Pelaksanaan RB:
Outcomes Oriented **, Terukur, Efisien,Efektif, Realistik, Konsisten, Sinergi,Inovatif,Kepatuhan,Dimonitor**

From:
Bad Governance

To:
Good Governance

PROSES PERBAIKAN
8 Area Perubahan

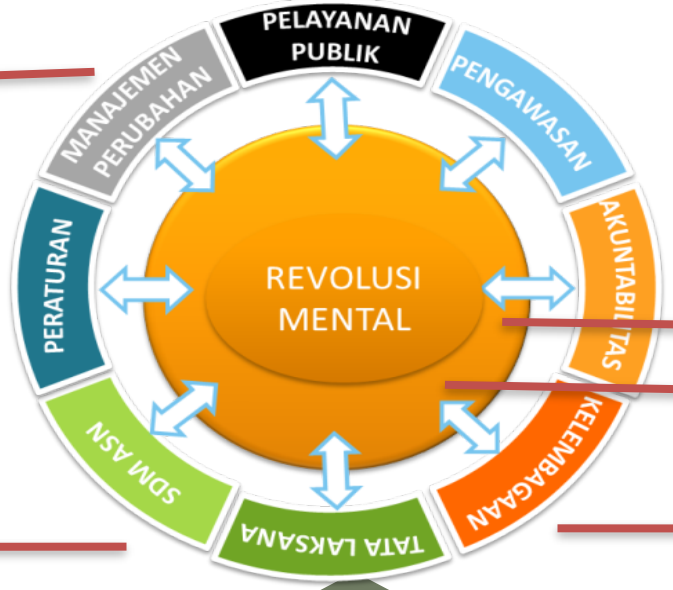

Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan kinerja rendah

Pemerintah belum efektif dan efisien

Pelayanan publik masih buruk

Isu Strategis Birokrasi

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

Hasil Antara Perubahan

- Evaluasi RB
- **Evaluasi AKIP**
- Evaluasi ZI WBK/WBBM (Proses & Hasil)

✔ **Percontohan Unit Kerja WBK/WBBM**

Pelopor Penggerak Perubahan (Agent of Changes & Role Model)

Kapasitas Assesor

✔ **Mindset (pola pikir) Culture set (budaya kerja)**

ISU STRATEGIS & HASIL ANTARA PERUBAHAN (pada 8 AREA)

AREA	ISU STRATEGIS (Patologi Birokrasi)	HASIL YANG DIHARAPKAN
	Organisasi gemuk, *fragmented* dan tumpang tindih fungsi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
	Sistem, proses dan prosedur kerja tidak jelas	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
	PerUUan Tumpang Tindih (Overlapping)	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
	Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
	Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi , Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah, dan Pengawasan Masyarakat belum optimal	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
	Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
	Kualitas pelayanan publlik masih rendah	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
	Pola pikir berdasarkan aturan semata (ruled based) & Integritas yang masih rendah	Birokrasi dengan budaya integritas dan kinerja yang tinggi

Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi

KINERJA

Memastikan kinerja yang akan diwujudkan telah sesuai dengan mandat dan memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat

PROSES BISNIS

Memastikan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

Memastikan organisasi yang paling tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menjalankan proses bisnis dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi

MANAJEMEN SDM

Memastikan standar kompetensi SDM untuk mengisi struktur organisasi yang telah dirancang.

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI

Money Follow Program

Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi h[illegible])

e-Government

Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik.

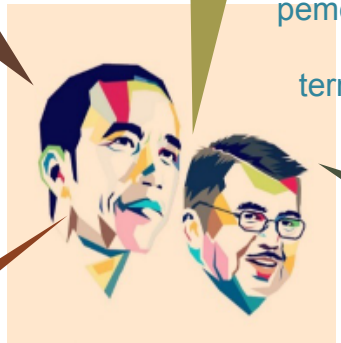

Fokus Kinerja, bukan SPJ

ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.

Stop Pemborosan Anggaran

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.

EFISIENSI

- **Menghemat** jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting.
- Anggaran digunakan hanya untuk membiayai **program/kegiatan prioritas** yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
- Anggaran yang digunakan menghasilkan **manfaat besar untuk masyarakat.**

Permasalahan Pengelolaan Anggaran di Indonesia

Jumlah Anggaran Terbatas

vs

Instansi Pemerintah Terlalu Banyak & Gemuk

↓

Jumlah Program / Kegiatan Semakin Banyak

↓

Kebutuhan Anggaran Meningkat

↓

Banyak program / kegiatan yang dibiayai tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah

↓

Potensi Pemborosan Anggaran

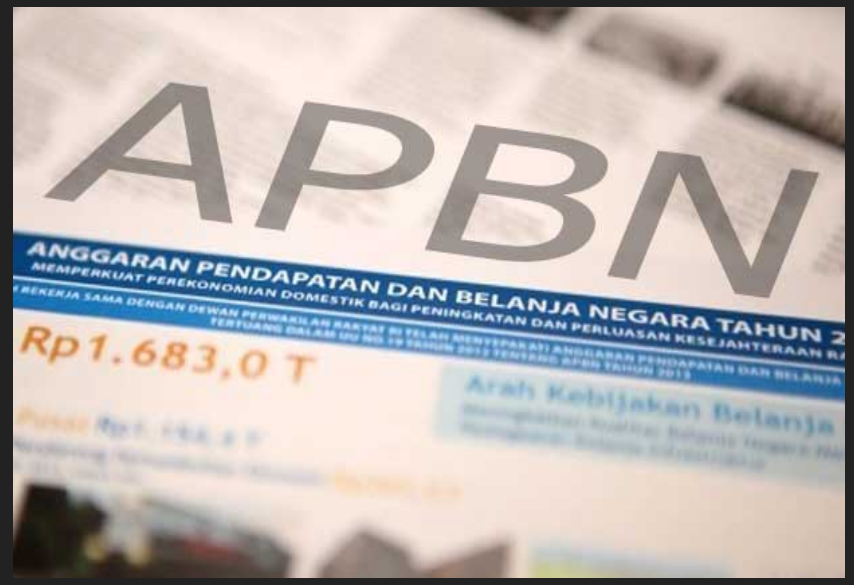

Bagaimana Mengatasinya ?

Manajemen Kinerja

Tentukan hasil (outcomes) prioritas yang ingin dicapai

Tentukan ukuran keberhasilan (outcomes) dan targetnya

Rancang program & kegiatan untuk mencapai outcomes tersebut

Tetapkan Anggaran

"Performance management and efficiency have a very straightforward relationship. The very purpose of performance management is improvement in use of resources which leads to efficiency."
(Homayounizadpanah & Baqerkord, 2012)

Mandat Berakuntabilitas Kinerja

Dasar Hukum Berakuntabilitas Kinerja

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998

UU Nomor 28 Tahun 1999

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

UU Nomor 17/2003,
UU Nomor 1/2004 , UU 15/2004, dan UU 25/2004

PP Nomor 8/2006

Perpres Nomor 29 Tahun 2014

UU Nomor 5 Tahun 2014

- Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu **asas umum dalam penyelenggaraan negara**.
- UU Nomor 17/2003 menegaskan bahwa salah satu asas ***best practices*** dalam pengelolaan keuangan negara adalah **akuntabilitas berorientasi pada hasil** atau dengan kata lain manajemen pemerintahan kita telah memasuki era ***performance-based management.***
- UU Nomor 1/2004 **menyatakan bahwa** Laporan pertanggungjawaban **meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja**. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah.
- UU Nomor 15/2014 menyatakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- UU Nomor 25/2004 menyatakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. dan salah satu tujuannya menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- ***PP 8 /2006.*** **Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja** instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditetapkan dalam **Peraturan Presiden.**
- **Perpres Nomor 29/2014 penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporan kinerja dan dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tatacara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan**
- UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa **kinerja instansi** pemerintah menjadi dasar dari pengukuran **kinerja individu. (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi**
- PP 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

UU NO. 28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
UU NO. 25 TAHUN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Asas-asas umum penyelenggaraan negara:

- Kepastian Hukum
- Tertib Penyelenggaraan Negara
- Kepentingan Umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- **Akuntabilitas**

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

UU NO. 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA
UU NO. 1 TAHUN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA
UU NO. 15 TAHUN 2003 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara:

- **Akuntabilitas berorientasi pada hasil;**
- Profesionalitas
- Proporsionalitas
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
- Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Makna
Asas Akuntabilitas

setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(TAP MPR XI/98 dan UU No. 28 Th. 1999)

Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik**

(Perpres 29/2014)

Bagaimana mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

Instrumen mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Input
(Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan)

Kinerja
(berapa besar pencapaian kinerja (Output & Outcome yang dihasilkan)

Apa itu Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP

Adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian,pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. (Perpres 29 Tahun 2014)

KOMPONEN SAKIP

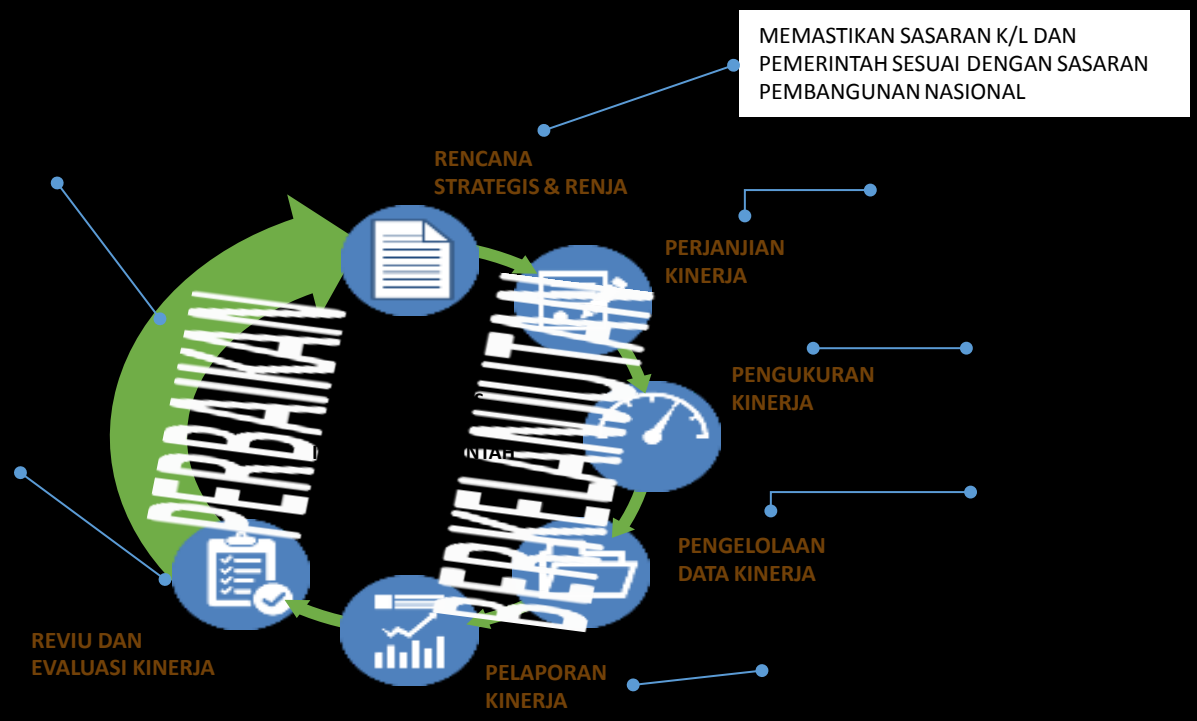

SIKLUS SAKIP

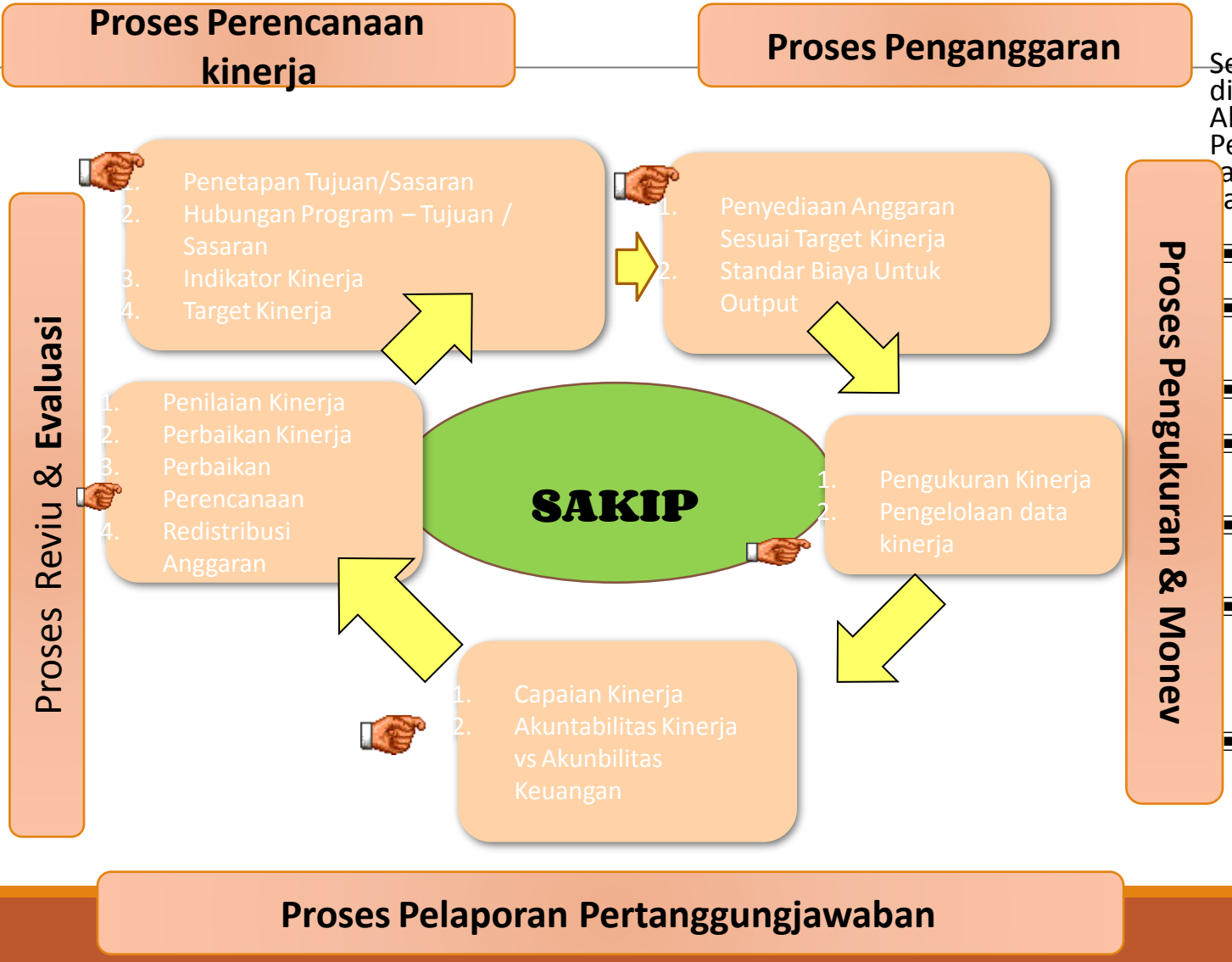

Secara sederhana dapat digambarkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah satu rangkaian siklus manajemen yaitu:

- Merencanakan kinerja;
- Merencanakan program/ kegiatan;
- Menyusun anggaran;
- Melaksanakan program/ kegiatan;
- Mengukur dan monitoring capaian
- melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja; serta
- Melakukan Reviu & Evaluasi internal.

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN (PP 8/2006)

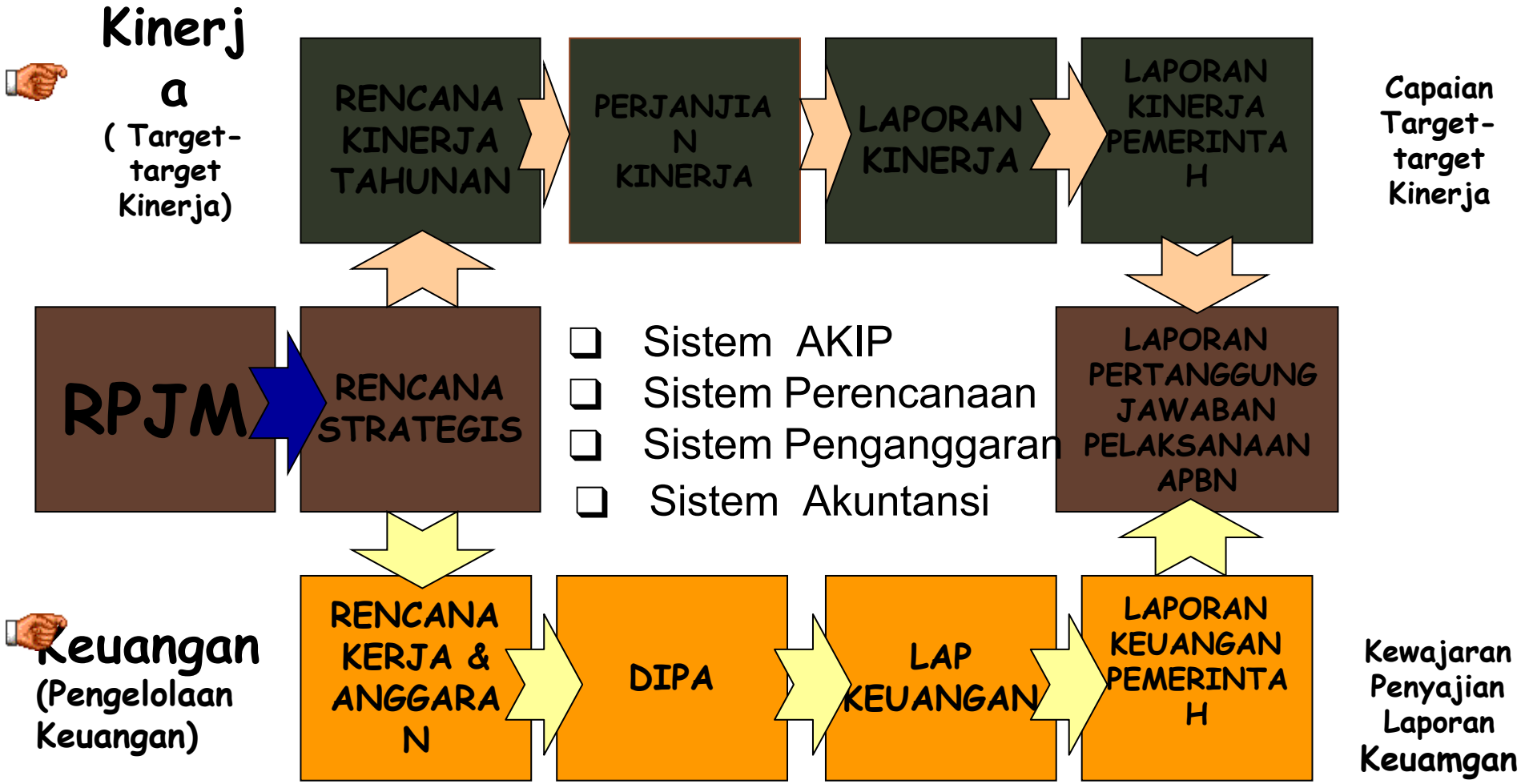

Keterkaitan sistem

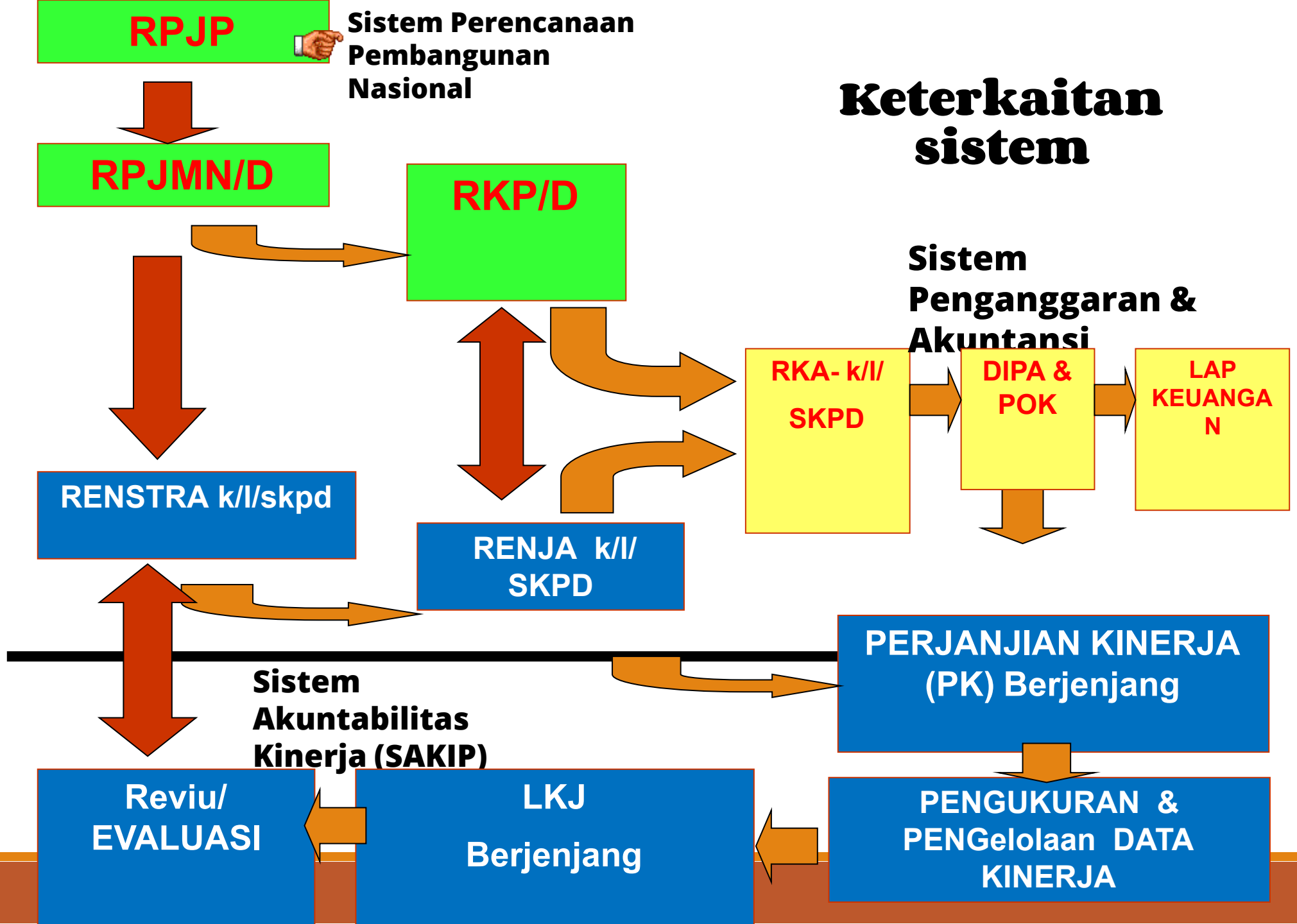

Inti Akuntabilitas Kinerja :

Keselarasan
(Aligment)

:
Berorientasi Hasil
(Outcome)

1. Clarity about objectives
   - ✔ Outcomes
   1. Link between objectives and means
      - ✔ Outputs, processes and inputs
      1. Information on results
         - ✔ Performance indicators SMART

         Targets for results
         - ✔ Measurable & Logic

ARSITEKTUR & STRUKTUR KINERJA ORGANISASI

(hasil sebuah penyelarasan kinerja antara struktur perencanaan pembangunan, struktur anggaran, dan struktur organisasi)

Kerangka Arsitektur Kinerja Organisasi Pemerintah (Daerah)

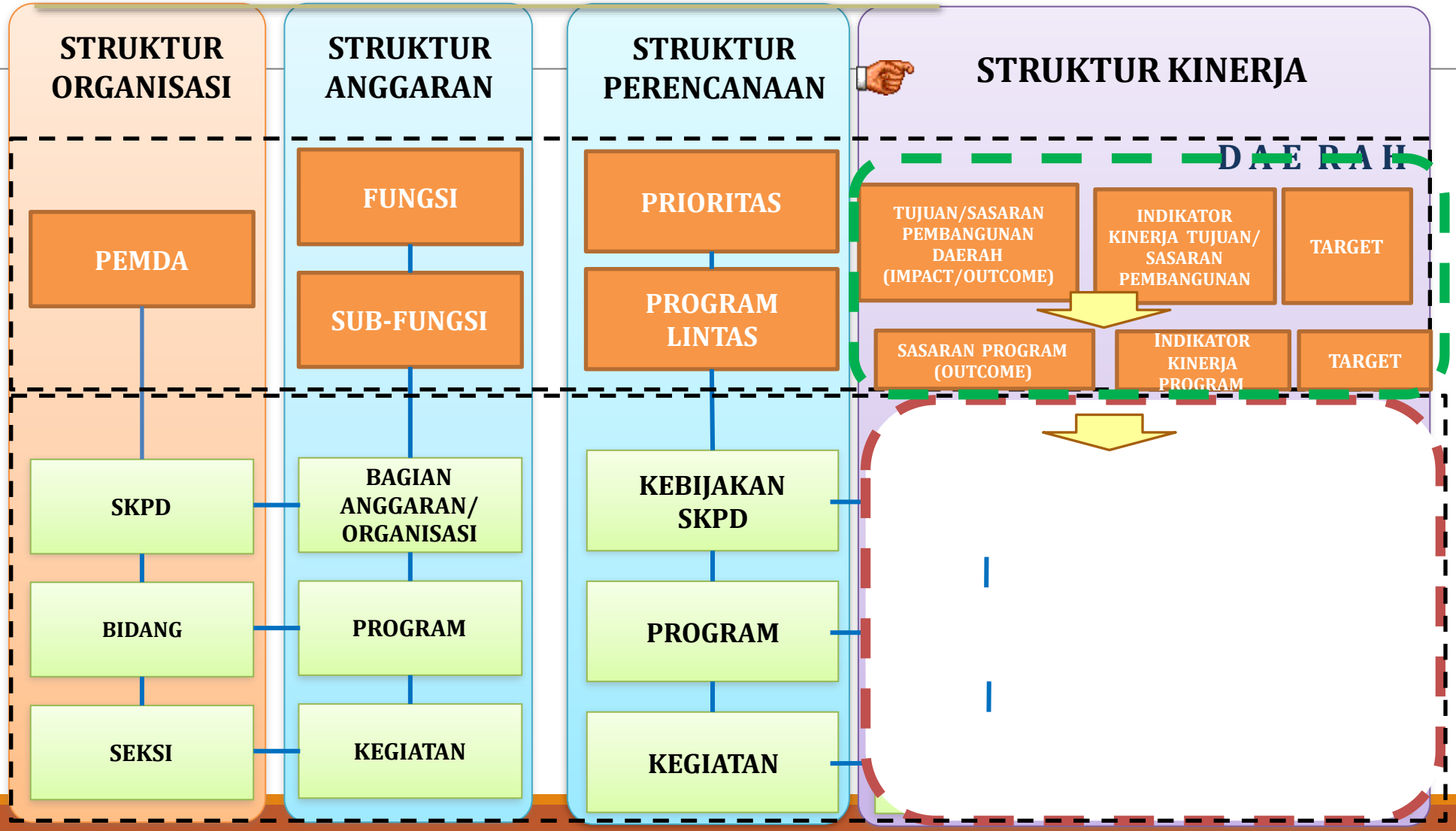

Kerangka Kerja Logis Kinerja Organisasi (Daerah)

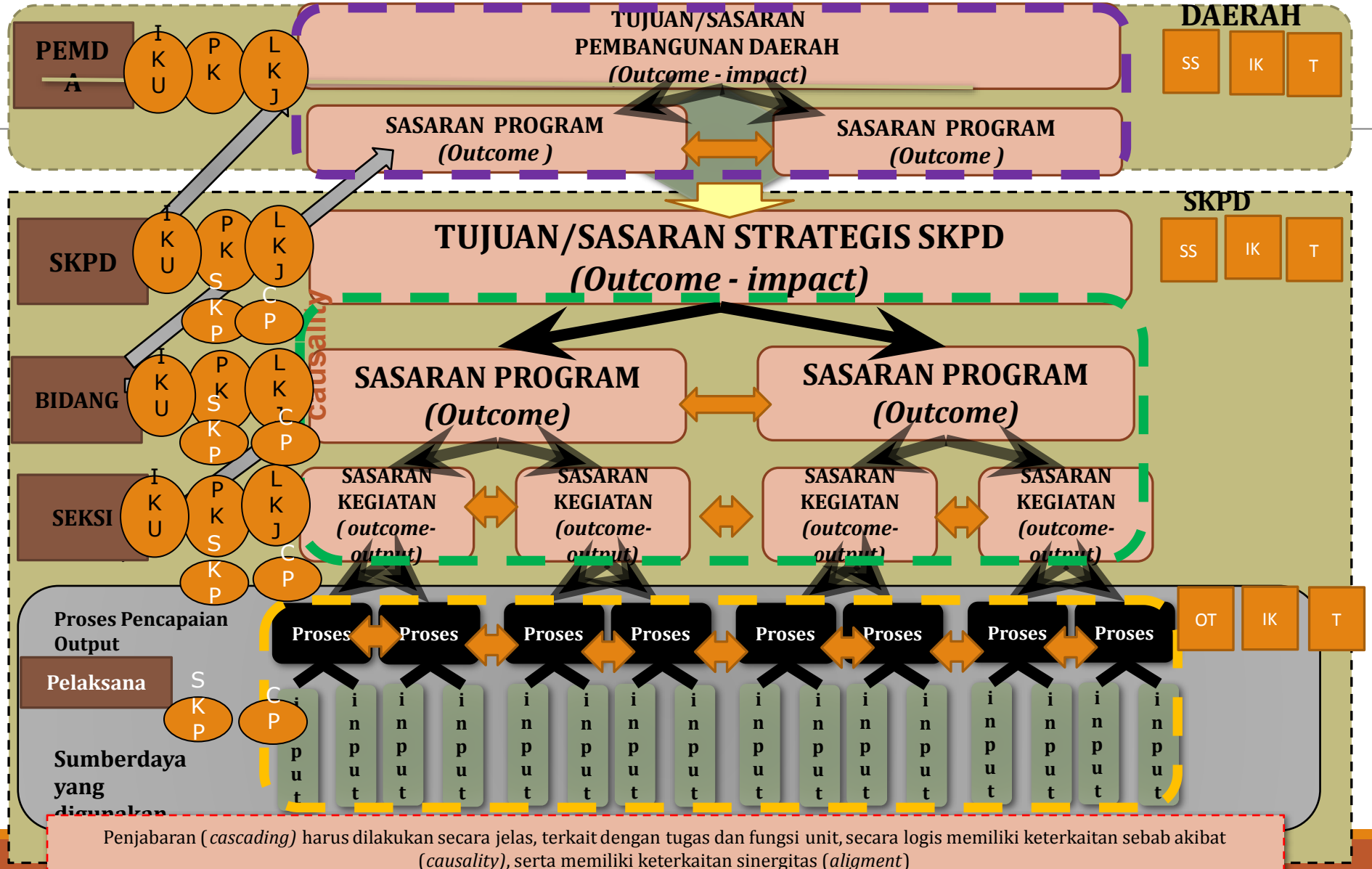

Penjabaran (*cascading*) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*aligment*)

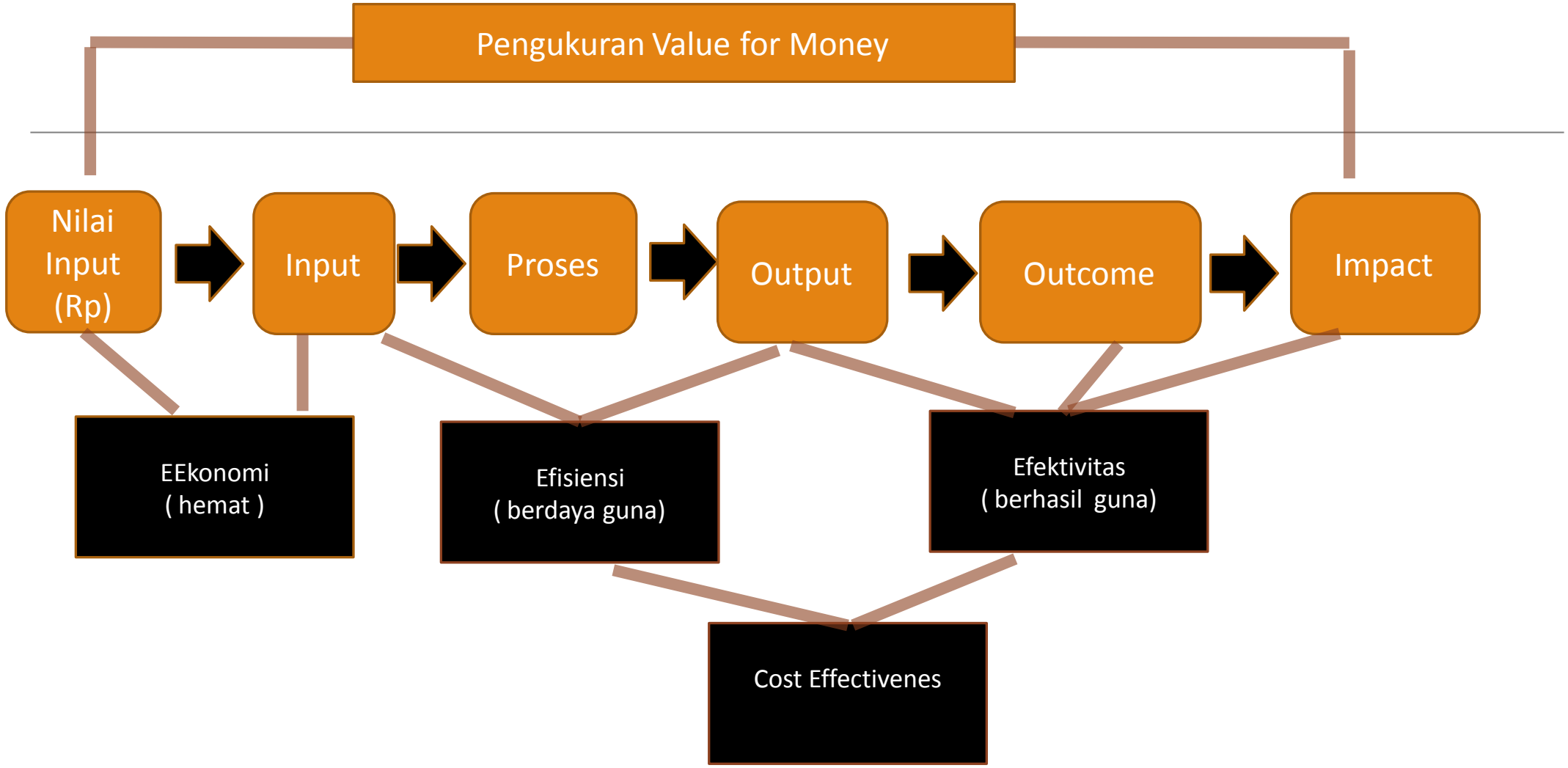
Pengukuran Value for Money
Nilai Input (Rp)
Input
Proses
Output
Outcome
Impact
EEkonomi (hemat)
Efisiensi (berdaya guna)
Efektivitas (berhasil guna)
Cost Effectivenes

POLA PIKIR
PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA ORGANISASI

BERORIENTASI HASIL (OUTCOME)

CIRI Berorientasi Hasil *(Outcome)*

1. Clarity about objectives

✔ Outcomes

2. Link between objectives and means

✔ Outputs, processes and inputs

3. Information on results

✔ Performance indicators

4. Targets for results

PLANNING

INPUTS	OUTPUTS		OUTCOMES		
Programmatic investments	Activities	Participation	Short	Medium	Long term

EVALUATION

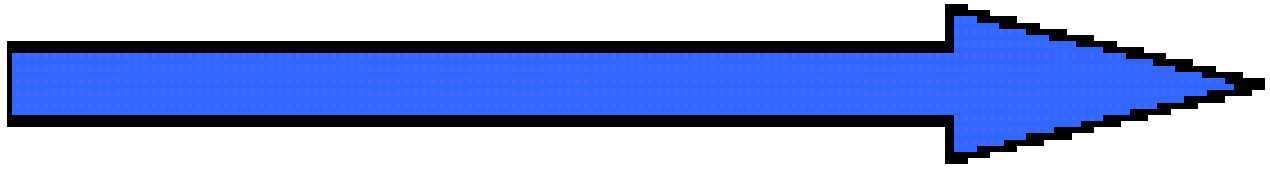

Kerangka Umum Penyusunan *Logic Model*

CONTOH PENYUSUNAN *LOGIC MODEL*

(Contoh: Membangun jaringan telekomunikasi di daerah)

Problems / Needs

Rendahnya penggunaan TIK di daerah dlm mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Impact

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi

Outcomes

- Meningkatnya produktifitas dan akses ke/dari pasar
- Menurunnya biaya transaksi bagi dunia usaha
- Meningkatnya usaha baru/pemula di daerah yang dibangun teknologi IT
- Meningkatnya penggunaan telpon dan internet

Outputs

- Terbangunnya hubs dan pusat IT di daerah
- Terbangunnya kabel fiber optik
- Terbangunnya sambungan telephone dan sambungan internet

Activities

- Membangun 4 hubs dan 54 pusat T&I di daerah
- Membangun 1,500 km kabel fiber optik
- Membangun 25,000 sambungan telephone dan 20,000 sambungan internet

Inputs

Alokasi APBN Rp 5 triliun

Asumsi

- Tidak ada perubahan strategi/kebijakan pemerintah
- Stabilitas politik
- Kerangka kerja institusi yang sesuai
- Stabilitas peraturan
- Cukup menguntungkan utk menarik minat investor swasta

BEBERAPA HAL PENTING TENTANG INDIKATOR KINERJA

FUNGSI INDIKATOR KINERJA

1. **Memperjelas apa, berapa & kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan.**
2. **Memperjelas siapa yang bertanggungjawab dan yang melaksanakan indikator dimaksud.**
3. **Menciptakan konsensus yg dibangun bersama oleh pihak terkait utk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya.**
4. **Membangun dasar utk pengukuran, analisis & evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.**

Kriteria Indikator Kinerja yang baik

Spesifik (Spesific)> IK dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur (Kualitas pendidikan diukur dengan Angka Kelulusan, APK,APM)

Dapat diukur (Measurable) > IK dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur hasilnya akan sama

Dapat dicapai (Attainable)> IK dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat

Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan) > IK harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur. (Input- IK Input, Output-IK Output, Outcome- IK Outcome)

Berjangka waktu tertentu (Time bound)> IK mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya

Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable) > Dapat ditelusur secara jelas sumber datanya.

Tipe Indikator Kinerja

Kualitatif: menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)

Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit)

Persentase: menggunakan angka persentase (misal: 50%, 100%)

Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)

Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)

Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)

POLARISASI INDIKATOR KINERJA

Maximize

Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik

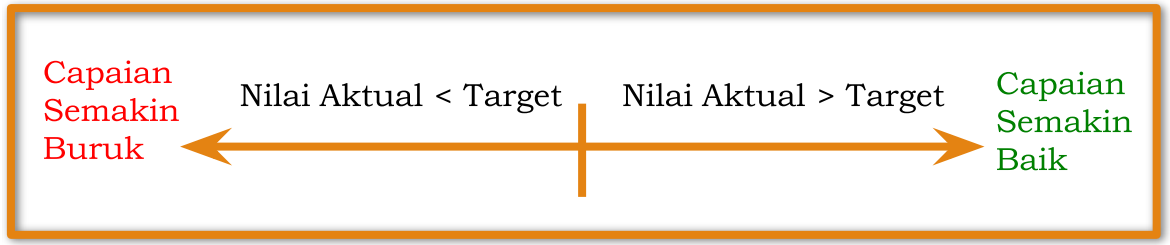

Minimize

Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik

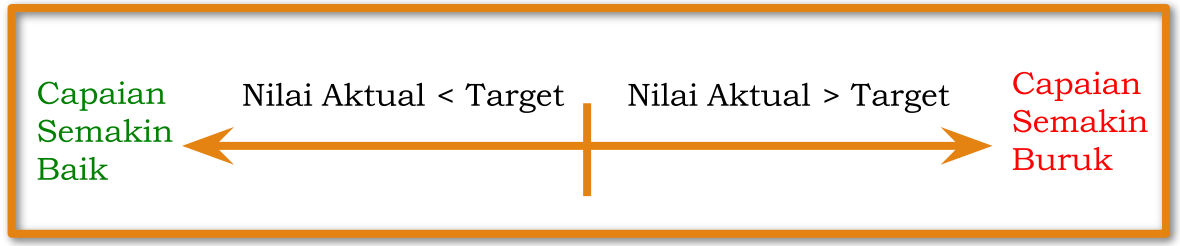

Stabilize

Semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik

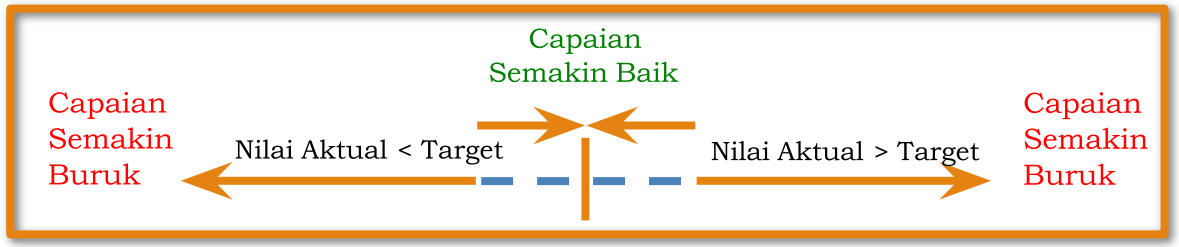

CONTOH

		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Problems / Needs	Rendahnya penggunaan TIK di daerah dlm mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		
Impact	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi	✔ *Angka pertumbuhan PDRB sektor* ✔ *Angka income perkapita masyarakat*	*...%* *..rp*
Outcomes	• Meningkatnya produktifitas dan akses ke/dari pasar • Menurunnya biaya transaksi bagi dunia usaha • Meningkatnya usaha baru/pemula di daerah yang dibangun teknologi IT • Meningkatnya penggunaan telpon dan internet	✔ *Angka produktivitas masyarakat* ✔ *Jumlah /volume transaksi masyarakat* ✔ *% penurunan biaya transaksi* ✔ *Jumlah umkm baru* ✔ *Jumlah pengguna telpon dan internat produktif*	*..x* *...Rp* *...%* *..orang*
Outputs	• Terbangunnya hubs dan pusat IT di daerah • Terbangunnya kabel fiber optik • Terbangunnya sambungan telephone dan sambungan internet	✔ *Jumlah pusat TI yang terbangun* ✔ *Panjang kabel fiber optik yang terpasang* ✔ *Jumlah sambungan telepon* ✔ *Jumlah sambungan internet*	*Pst TI* *...KM* *..SST* *...SSI*
Activities	• Membangun hubs danpusat T&I di daerah • Membangun km kabel fiber optik • Membangun sambungan telephone dan sambungan internet	✔ *Jumlah kegiatan pembangunan pusat TI yang dilaksanakan* ✔ *Jumlah kegiatan pemasangan kabel FO yang dilaksanakan* ✔ *Jumlah kegiatan pemasangan sambungan telepon dan internet yang dilaksanakan*	*...keg* *...keg* *...keg*
Inputs	Alokasi APBN Rp 5 triliun	*% penyerapan anggaran*	*....%*

Contoh

RPJMD

Meningkatkan Industri Pariwisata

PDRB sektor pariwisata
Target : 10%

Renstra SKPD

Keamanan wisatawan	Daya saing UKM	Daya saing pariwisata	Konektifitas antar daerah	Kualitas lingkungan hidup
Angka kriminalitas Target : 5%	% UMKM yang sehat Target 70%	Kunjungan wisatawan Target : 6 juta	Indeks aksesibilitas Target : 8	Indeks LH Target: 80

Program

Pencegahan kriminalitas	Iklim usaha kondusif	Pemasaran pariwisata	Layanan angkutan	Kesehatan lingkungan hidup
% potensi kriminalitas yang dicegah Target : 90%	Jumlah UMKM baru Target : 2000	% peningkatan wisatawan Target : 5%	% penumpang yang dilayani Target : 90%	% destinasi wisata kategori bersih Target : 90%

Kegiatan

Pencegahan kriminalitas	Iklim usaha kondusif	Pemasaran pariwisata	Layanan angkutan	Kesehatan lingkungan hidup
1. Patroli keamanan 2. Sosialisasi pencegahan	1. Pelatihan usaha baru 2. Bantuan koperasi	1. Penyelenggaraan promosi 2. Penyelenggaran travel dialog	1. Pemantauan angkutan jalan 2. Uji KIR Kendaraan	1. Pengelolaan sampah 2. Sosialisasi hidup sehat
Jumlah wilayah cakupan patroli Jumlah penduduk yang tersosialisasi	Jumlah wilayah UMKM yang dilatih Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas kredit permodalan	Jumlah kegiatan promosi Jumlah kegiatan forum dialoh biro jasa travel	Jumlah kegiatan pemantauan angkutan umum Jumlah Kendaraaan angkutan umum yang lulus KIR	Jumlah volume sampah yang terangkut Jumlah kelompok masyarakat yang tersosialisasi

SKPD

Pencegahan kriminalitas	Iklim usaha kondusif	Pemasaran pariwisata	Layanan angkutan	Kesehatan lingkungan hidup
Sat Pol PP	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Pariwisata	Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran

Pencegahan kriminalitas	Iklim usaha kondusif	Pemasaran pariwisata	Layanan angkutan	Kesehatan lingkungan hidup
Rp.4.000.000.000	Rp.2.000.000.000	Rp.3.000.000.000	Rp.1.500.000.000	Rp.900.000.000

KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Efisien

Skala nilai	
Kategori	Range Nilai
AA	90-100
A	80-90
BB	70-80
B	60-70
CC	50-60
C	30-50
D	0-30

Inefisiensi

30

PERENCANAAN KINERJA

Setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik dilevel outcome, output maupun input.

25

PENGUKURAN KINERJA

Setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya.

15

PELAPORAN KINERJA

Setiap instansi melaporkan kinerjanya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi.

10

EVALUASI KINERJA

Setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran

20

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah pada kurun waktu satu tahun.

INEFISIENSI TERJADI KARENA :

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil).
2. Ukuran kinerja tidak jelas.
3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran.
4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

MINIMUM REQUIREMENT

	PEMDA		UNIT		PK ES3/4		RENCANA AKSI	EVALUASI INTERNAL		CASCADING		APLIKASI	MANAJEMEN KINERJA
AA													
A	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	3/3 OPD	ADA	Y	ADA	Y	ADA, INTEGRASI	ADA, IMPLEMENTASI
	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	Y		KWAL	Y	KWAL	Y		
	CASCADING		CASCADING		CASCADING								
BB	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	2/3 OPD	ADA	Y	ADA	Y	ADA	ADA, KUALITAS
	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	Y		KWAL	Y	KWAL	Y		
	CASCADING		CASCADING		CASCADING					OPD			
B	ADA	Y	ADA	Y	ADA	Y	1/3 OPD	ADA	Y	ADA	P	X	X
	KWAL	Y	KWAL	Y	KWAL	T		KWAL	T	KWAL	T		
			1/3 OPD		1/3 OPD					PEMDA			
CC	ADA	Y	ADA	Y	X		X	X		X		X	X
	KWAL	Y	KWAL	T									
C	ADA	Y	ADA	Y	X		X	X		X		X	X
	KWAL	T	KWAL	T									
D	TIDAK ADA		TIDAK ADA		X		X	X		X		X	X

®onn 2017

SIKLUS E-PERFORMANCE BUDGETING

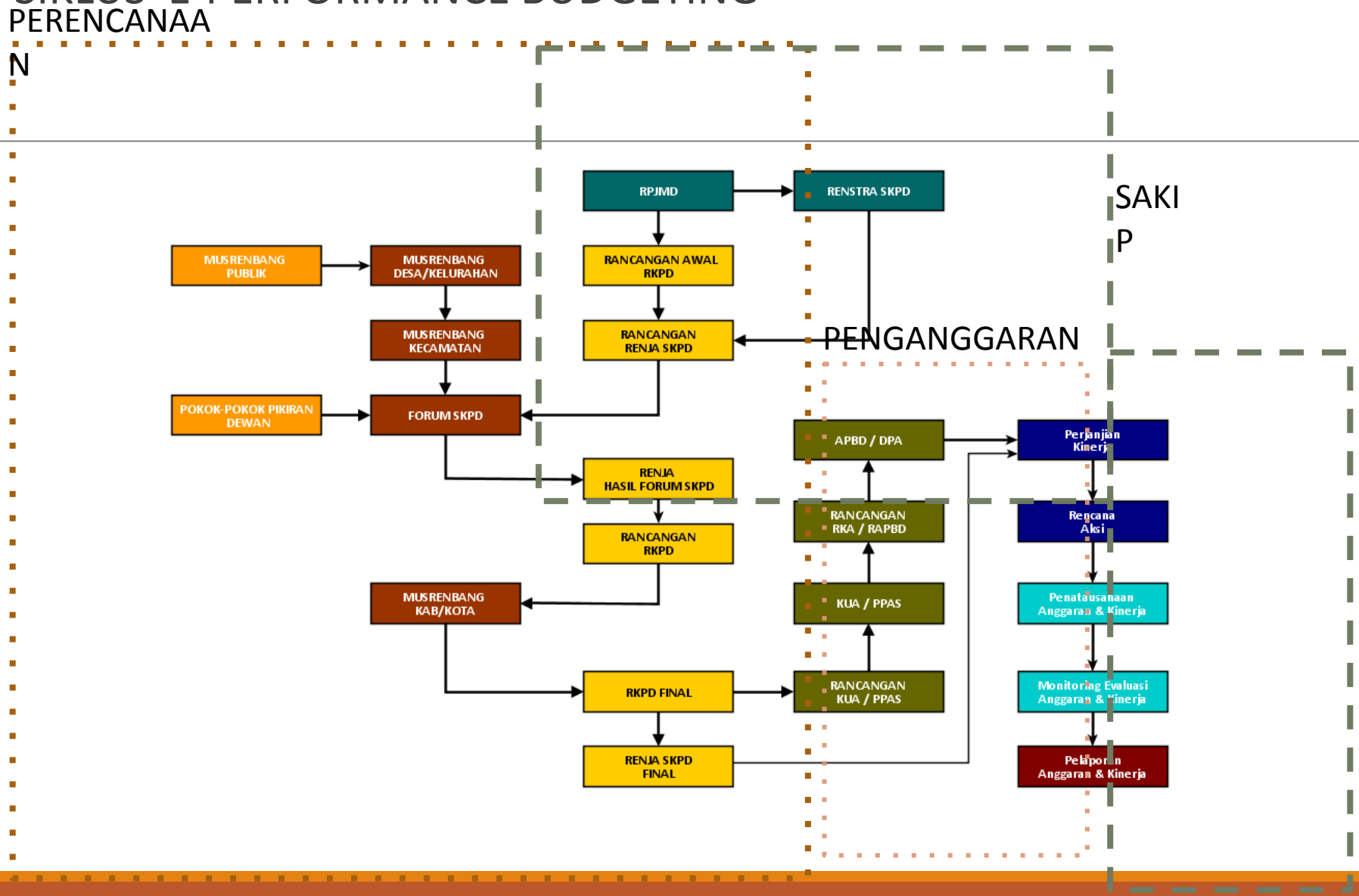

Sebelum

MANFAAT
e-PERFORMANCE BASED BUDGETING

Sesudah

- Belum ada Keselarasan Renstra SKPD - RPJMD
- Belum ada Sinergi Perencanaan antar SKPD
- Duplikasi
- Kurang Fokus pada Kinerja
- Anggaran Tidak Difokuskan pada Priotitas
- Informasi Kinerja Berbeda satu sama lain
- Tidak Ada Keterpaduan Sistem Pelaporan
- Monev Fokus pada target Anggaran
- Baru mengukur efisiensi alokasi anggaran

- Terkawalnya Keselarasan Renstra SKPD - RPJMD
- Terbangunnya Sinergi Perencanaan antar SKPD
- Mungurangi Duplikasi
- Fokus pada Kinerja
- Anggaran Sesuai Prioritas
- Konsistennya Informasi Kinerja
- Sistem Pelaporan Terpadu
- Monev Fokus pada target Kinerja & Anggaran
- Dapat mengukur Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sumber : Kemenpan RB

FITUR APLIKASI

Statejik / Jangka Menengah
- RPJMD
- RENSTRA SKPD

Tahunan
- Musrenbang
- RKPD
- Renja SKPD

- KUA / PPAS
- RKA / RAPBD
- DPA / APBD
- Anggaran Kas

- Perjanjian Kinerja
- Rencana Aksi Kinerja

- Penatausahaan Pendapatan
- Penatausahaan Belanja
- Penatausahaan Kas Daerah
- Akuntansi
- Monev Anggaran & Kinerja

- LKPD (Lap. Keuangan Pem Daerah)
- LPJ (Lap Pert. Pelaksanaan APBD)
- LPPD (Lap Penyelenggaran Pem Daerah)
- ILPPD (Ikhtisar LPPD)
- LKPJ (Lap Keterangan Pertanggujawaban)
- LKjIP (Lap Kinerja Instansi Pemerintah)
- Dashboard Kinerja

FASE PERENCANAAN STRATEJIK

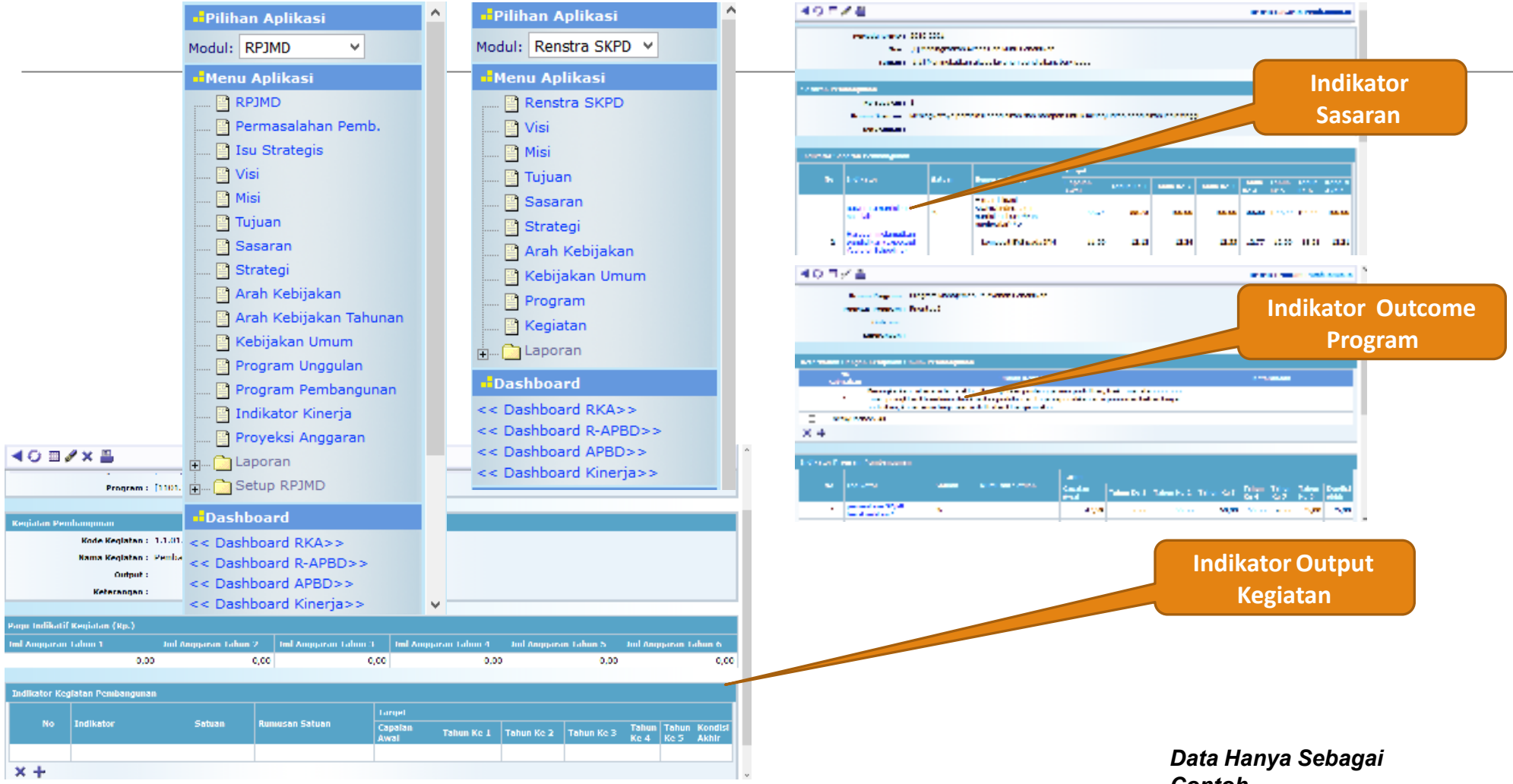

Data Hanya Sebagai Contoh

FASE PERENCANAAN TAHUNAN

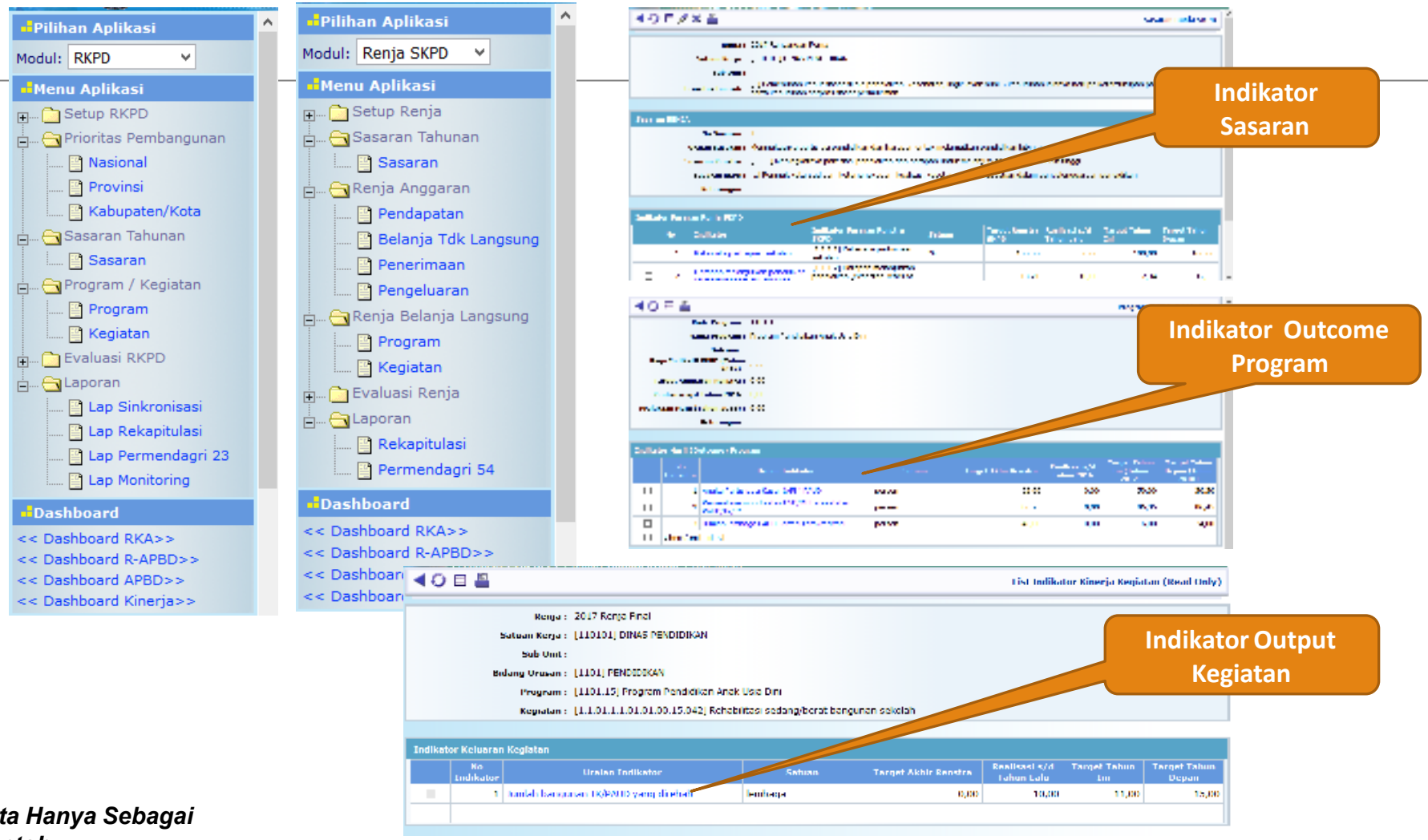

Data Hanya Sebagai Contoh

FASE PENGANGGARAN

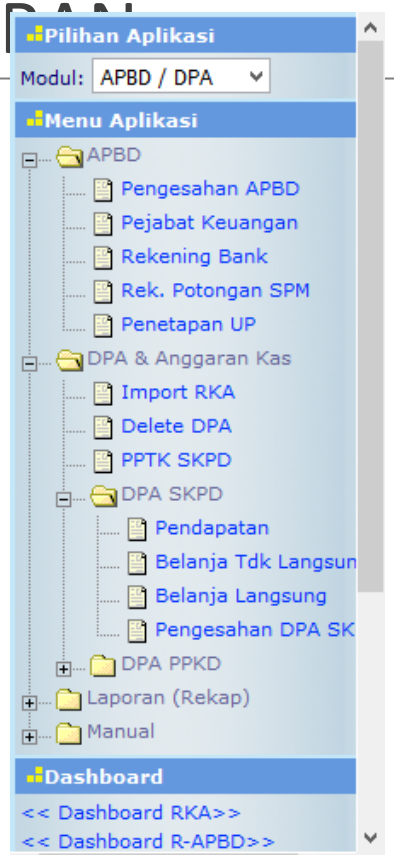

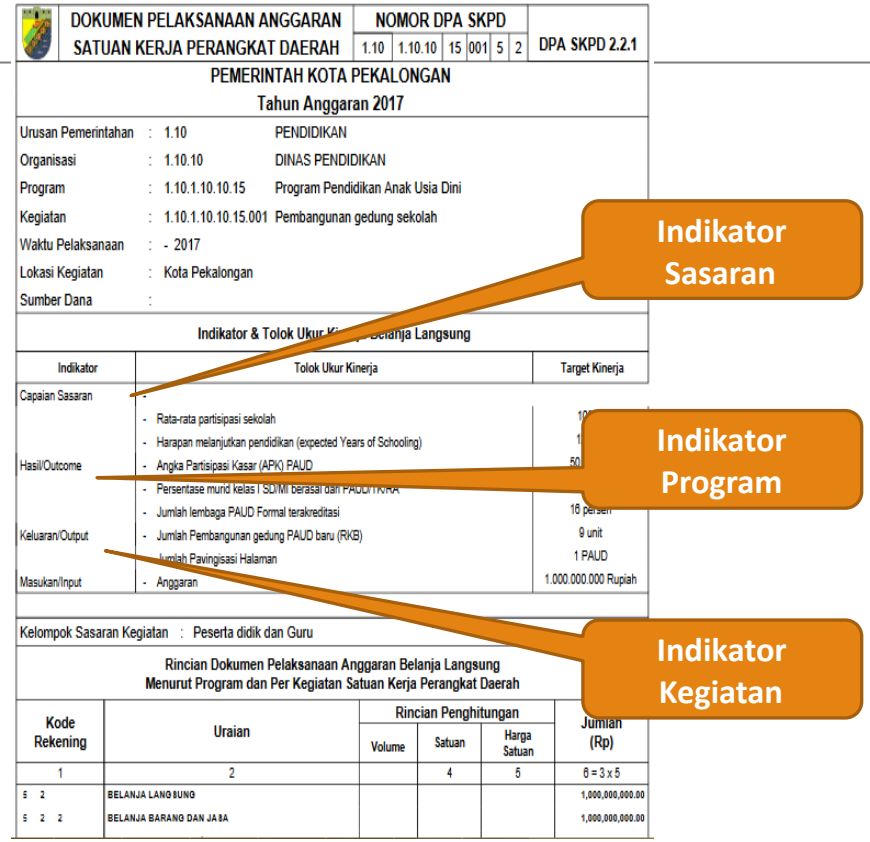

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD						
1.10	1.10.10	15	001	5	2	DPA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan	:	1.10	PENDIDIKAN
Organisasi	:	1.10.10	DINAS PENDIDIKAN
Program	:	1.10.1.10.10.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan	:	1.10.1.10.10.15.001	Pembangunan gedung sekolah
Waktu Pelaksanaan	:	- 2017	
Lokasi Kegiatan	:	Kota Pekalongan	
Sumber Dana	:		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Sasaran	-	
	- Rata-rata partisipasi sekolah	10
	- Harapan melanjutkan pendidikan (expected Years of Schooling)	1
Hasil/Outcome	- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	50
	- Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA	
	- Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi	16 persen
Keluaran/Output	- Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru (RKB)	9 unit
	- Jumlah Pavingisasi Halaman	1 PAUD
Masukan/Input	- Anggaran	1.000.000.000 Rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta didik dan Guru

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				1,000,000,000.00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				1,000,000,000.00

Indikator Sasaran

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Data Hanya Sebagai Contoh

FASE PERJANJIAN KINERJA

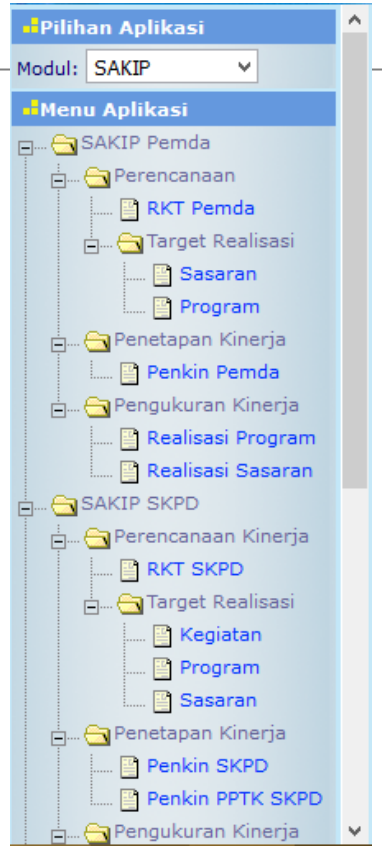

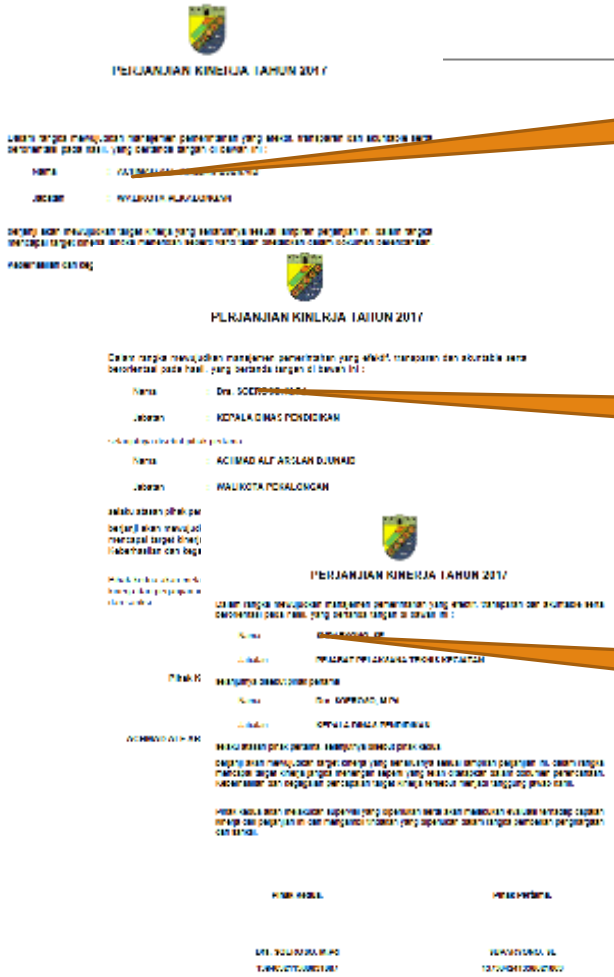

Perj. Kinerja Ka Daerah

Perj. Kinerja Ka SKPD

Perj. Kinerja PPTK

Data Hanya Sebagai Contoh

FASE PENYUSUNAN RENCANA AKSI

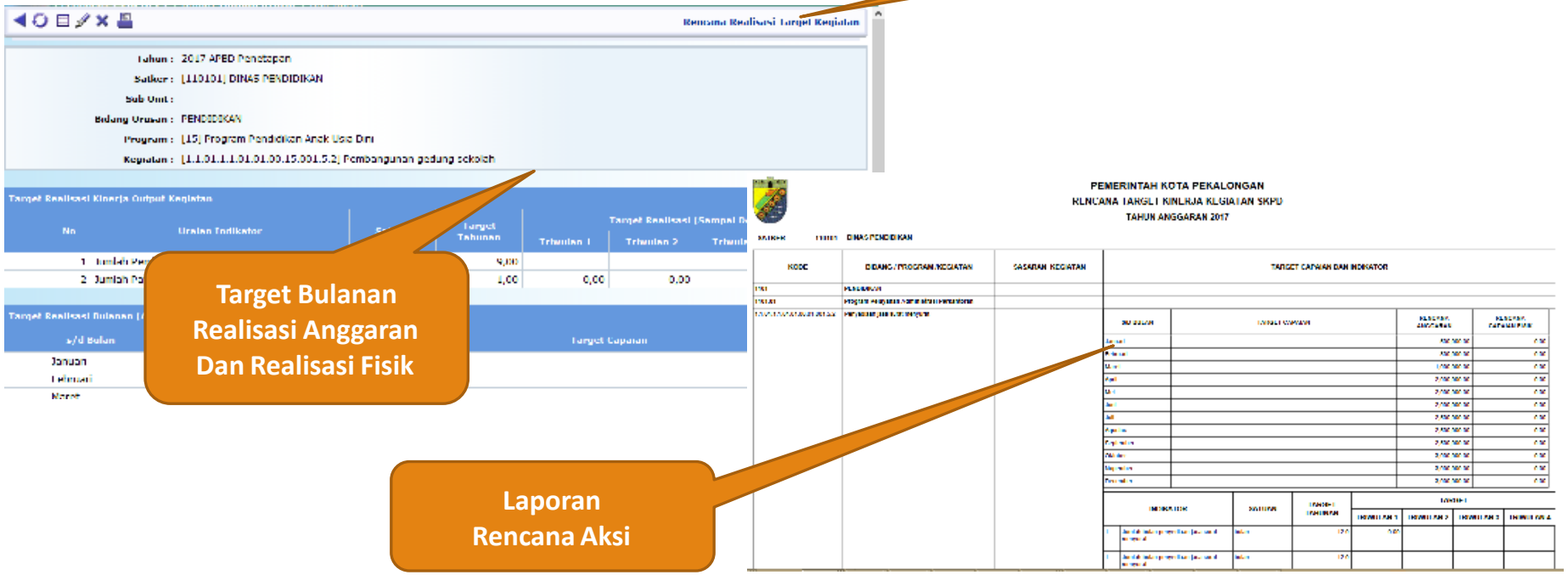

Data Hanya Sebagai Contoh

FASE PENGUKURAN

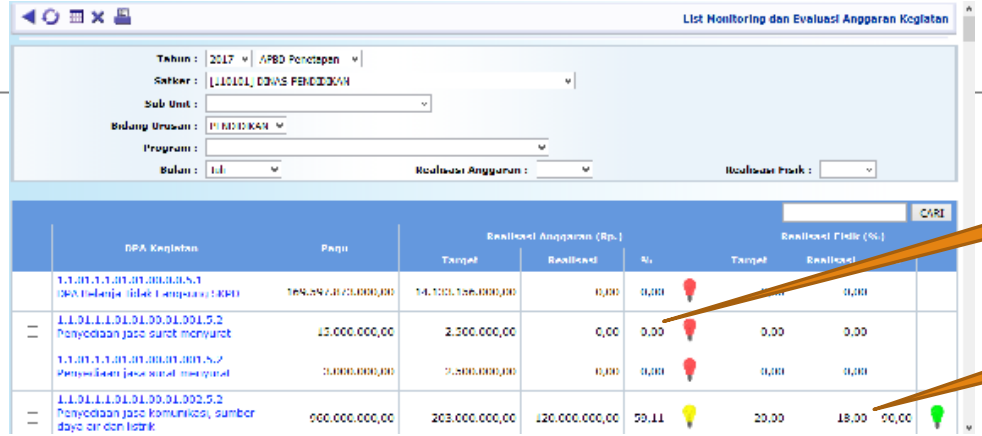

Realisiasi Anggaran (Bulanan)

Realisiasi Fisik (Bulanan)

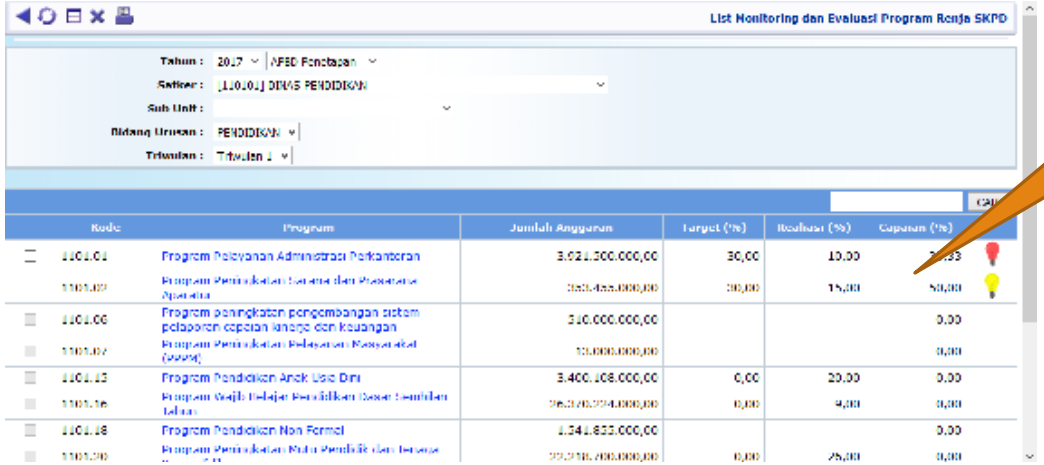

Realisasi Indikator Outcome Program (Triwulanan)

Data Hanya Sebagai Contoh

FASE PELAPORAN KINERJA

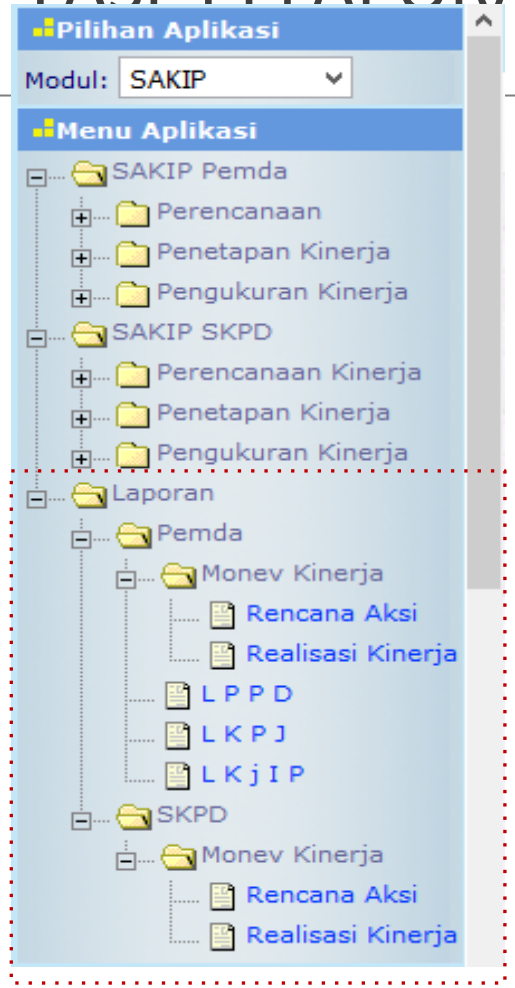

- **Monev Realisasi Kinerja & Anggaran**
- **LKPD**
  - **(Lap. Keuangan Pem Daerah)**
- **LPJ**
  - **(Lap Pert. Pelaksanaan APBD)**
- **LPPD**
  - **(Lap Penyelenggaran Pem Daerah)**
- **LKPJ**
  - **(Lap Keterangan Pertanggujawaban)**
- **LKjIP**
  - **(Lap Kinerja Instansi Pemerintah)**
- **Dashboard Kinerja**

POHON KINERJA (CASCADING)

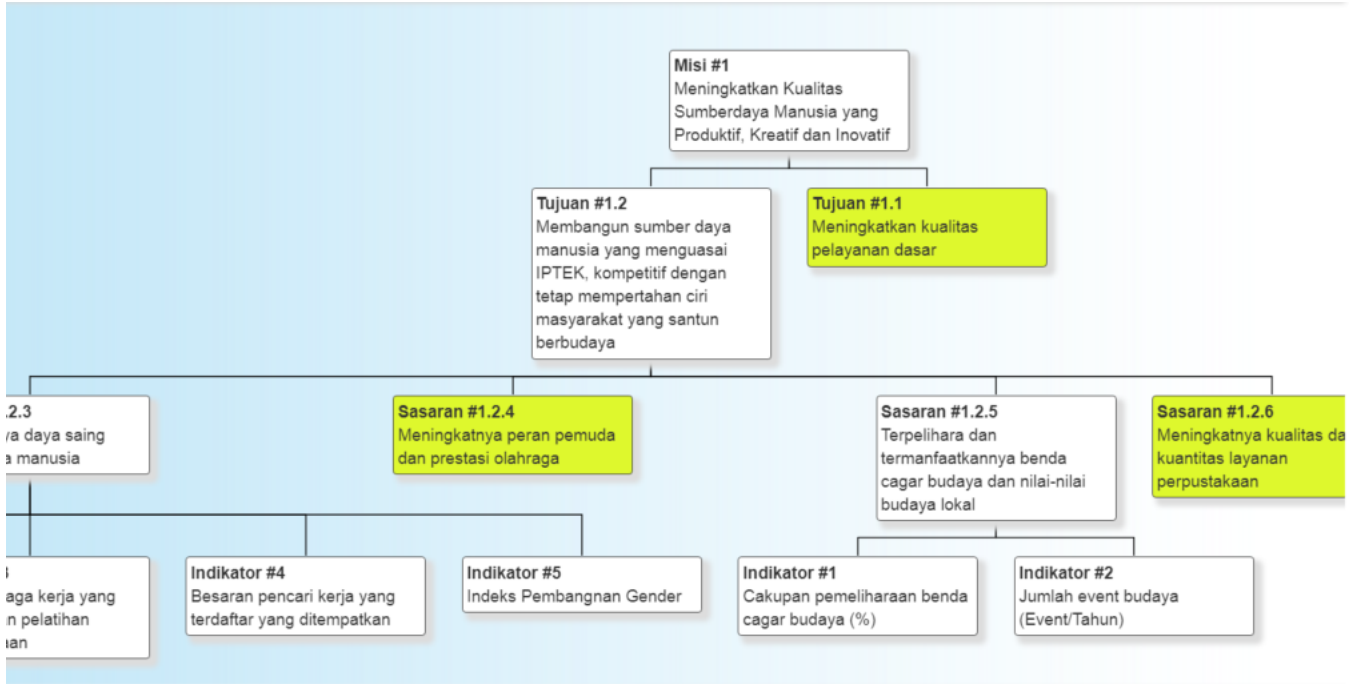

TERIMA KASIH

Keme dayagunaan Aparatur Negara
dan R okrasi